



**PENGUATAN EKOSISTEM UMKM MELALUI KOLABORASI
PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA: MODEL KEMITRAAN DAN
MANAJEMEN HUBUNGAN STAKEHOLDER**

*Strengthening The Msme Ecosystem Through Collaboration Between The
Government And The Business World: Partnership Model And Stakeholder
Relationship Management*

Uning Heri Gagarin¹, Jumadiyah Wardati², Lidia Simanjuntak³

^{1,2,3}Universitas Efarina, Indonesia

¹Email: b209gg@yahoo.com

²Email: wardatijuma@gmail.com

Abstract

This Community Service (PkM) activity aims to strengthen the SME ecosystem through collaboration between the government and the business sector by developing an operational partnership model and a measurable stakeholder relationship management system. Common challenges include fragmented SME support programs, limited market access and financing, inconsistent quality standards, and cross-sector coordination that lacks established working mechanisms and shared indicators. The PkM intervention is carried out through mapping of stakeholders and SME needs, designing partnership models (governance, roles, service workflows), developing joint program packages (market access, product upgrading, financing, digitalization), and establishing a coordination platform in the form of a partnership forum and a KPI dashboard. Key outputs include partnership model documents, MoU/MOU templates, collaboration SOPs, stakeholder maps, and a 12-month action plan ready for implementation.

Keywords: MSMEs; Partnership Model; Stakeholders

Abstrak

Kegiatan PkM ini bertujuan memperkuat ekosistem UMKM melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dengan menyusun model kemitraan yang operasional serta sistem manajemen hubungan stakeholder yang terukur. Permasalahan yang umum ditemui adalah program dukungan UMKM yang terfragmentasi, keterbatasan akses pasar dan pembiayaan, standar mutu yang belum konsisten, serta koordinasi lintas pihak yang belum memiliki mekanisme kerja dan indikator bersama. Intervensi PkM dilakukan melalui pemetaan stakeholder dan kebutuhan UMKM, perancangan model kemitraan (governance, peran, alur layanan), penyusunan paket program bersama (market access, upgrading produk, pembiayaan, digitalisasi), serta pembentukan platform koordinasi berupa forum kemitraan dan dashboard KPI. Luaran utama berupa dokumen model kemitraan, MoU/PKS template, SOP kolaborasi, peta stakeholder, dan rencana aksi 12 bulan yang siap diimplementasikan.

Kata Kunci: UMKM; Model Kemitraan; Stakeholder

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Peran strategis UMKM tidak hanya

terlihat dari jumlah unit usaha yang dominan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang bersifat berulang, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, akses pasar yang sempit, keterbatasan pembiayaan, serta rendahnya adopsi teknologi dan standar mutu produk.

Permasalahan tersebut seringkali diperparah oleh pendekatan pengembangan UMKM yang masih terfragmentasi. Program-program dukungan dari pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga pendukung lainnya belum terintegrasi secara optimal. Akibatnya, banyak intervensi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas, sehingga dampaknya menjadi kurang maksimal. Selain itu, hubungan antar pemangku kepentingan dalam ekosistem UMKM belum memiliki mekanisme kerja yang terstruktur dan terukur, sehingga kolaborasi yang terjadi cenderung bersifat insidental.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sangat penting untuk memperkuat ekosistem UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kebijakan, fasilitasi, serta pembinaan, sementara dunia usaha memiliki akses terhadap pasar, standar mutu, serta jaringan rantai pasok yang luas. Sinergi antara kedua pihak ini, jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang dan naik kelas.

Namun demikian, kolaborasi yang efektif tidak dapat terjadi secara spontan, melainkan memerlukan desain kemitraan yang jelas dan sistematis. Desain tersebut harus mencakup tujuan bersama, pembagian peran yang tegas, mekanisme kerja yang terstruktur, serta sistem pengukuran kinerja yang transparan. Selain itu, diperlukan pula manajemen hubungan stakeholder yang mampu menjaga koordinasi, komunikasi, dan tindak lanjut secara konsisten.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan model kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat ekosistem UMKM. Model yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada aspek konseptual, tetapi juga dirancang agar operasional dan dapat langsung diterapkan di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga mengembangkan sistem manajemen hubungan stakeholder yang terukur guna memastikan keberlanjutan kolaborasi.

Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta suatu ekosistem UMKM yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdaya saing. UMKM tidak hanya mendapatkan akses terhadap pasar dan pembiayaan, tetapi juga memperoleh dukungan dalam peningkatan kualitas produk serta penguatan kelembagaan.

METODE

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem UMKM. Tahap awal dimulai dengan kegiatan koordinasi dan penyelarasan tujuan antara pemerintah, dunia usaha, serta komunitas UMKM. Pada tahap ini dilakukan diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai arah dan tujuan kolaborasi yang akan dibangun.

Selanjutnya dilakukan pemetaan stakeholder untuk mengidentifikasi pihak-

pihak yang memiliki peran dan kepentingan dalam pengembangan UMKM. Pemetaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing pihak, sehingga dapat ditentukan strategi pengelolaan hubungan yang tepat. Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap nilai yang dapat diberikan oleh masing-masing stakeholder dalam mendukung pengembangan UMKM.

Tahap berikutnya adalah asesmen kebutuhan UMKM melalui survei dan diskusi kelompok terarah. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM, baik dalam aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, maupun legalitas usaha. Hasil asesmen kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang program kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil pemetaan dan asesmen, dilakukan perancangan model kemitraan yang mencakup struktur kelembagaan, pembagian peran, serta alur kerja kolaborasi. Model ini dilengkapi dengan standar operasional prosedur yang mengatur mekanisme kerja antar pihak, serta sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif.

Selanjutnya disusun portofolio program kolaboratif yang terdiri dari program jangka pendek dan jangka menengah. Program ini dirancang untuk memberikan dampak langsung sekaligus membangun fondasi bagi pengembangan jangka panjang. Selain itu, disusun pula indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program.

Tahap implementasi dilakukan melalui pelaksanaan program pilot dalam jangka waktu tertentu. Program ini difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak tinggi, seperti akses pasar dan peningkatan mutu produk. Selama pelaksanaan, dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana.

Tahap akhir adalah evaluasi dan penyusunan rencana pengembangan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk menyempurnakan model kemitraan serta menyusun rencana pengembangan untuk periode berikutnya.

HASIL

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang terstruktur mampu meningkatkan efektivitas pengembangan UMKM. Pemetaan stakeholder yang dilakukan menghasilkan gambaran yang jelas mengenai peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam ekosistem. Hal ini memudahkan dalam membangun koordinasi dan sinergi antar stakeholder.

Pembentukan forum kemitraan menjadi salah satu capaian penting dalam kegiatan ini. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengambilan keputusan, sehingga setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan terukur. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul secara bersama-sama.

Dalam aspek pengembangan UMKM, terjadi peningkatan dalam jumlah pelaku usaha yang terkurasi dan siap untuk mengakses pasar. Program kurasi yang dilakukan membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi

standar yang dibutuhkan oleh pasar. Selain itu, kegiatan matchmaking antara UMKM dan pelaku usaha berhasil membuka peluang transaksi baru.

Peningkatan juga terlihat dalam akses pembiayaan, di mana beberapa UMKM berhasil memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM.

Dalam aspek kualitas produk, terjadi peningkatan dalam kepatuhan terhadap standar mutu. Program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk serta memenuhi persyaratan legalitas.

Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan berbagai luaran berupa dokumen model kemitraan, template kerja sama, serta sistem monitoring berbasis indikator kinerja. Luaran ini menjadi dasar bagi pengembangan program yang lebih luas di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis kolaborasi. Model kemitraan yang dikembangkan dalam kegiatan ini mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak sehingga tercipta sinergi yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis ekosistem yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam menciptakan nilai bersama.

Keberhasilan implementasi model ini sangat dipengaruhi oleh kejelasan struktur kelembagaan dan mekanisme kerja. Dengan adanya pembagian peran yang jelas serta sistem koordinasi yang terstruktur, setiap pihak dapat berkontribusi secara optimal. Selain itu, penggunaan indikator kinerja membantu memastikan bahwa setiap program memiliki target yang jelas dan dapat diukur.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi model ini. Perbedaan kepentingan antar stakeholder seringkali menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, komitmen dari pihak dunia usaha dalam menjalin kemitraan jangka panjang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun kepercayaan serta menunjukkan manfaat nyata dari kolaborasi yang dilakukan.

Dalam jangka panjang, keberlanjutan program menjadi aspek yang sangat penting. Tanpa adanya mekanisme yang memastikan kesinambungan program, upaya yang telah dilakukan berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang mampu menjaga kontinuitas program serta mendorong inovasi dalam pengembangan UMKM.

KESIMPULAN

Penguatan ekosistem UMKM melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha. Model kemitraan yang terstruktur, didukung oleh manajemen hubungan stakeholder yang baik, mampu menciptakan sinergi yang berkelanjutan dalam pengembangan UMKM.

Penerapan model ini tidak hanya meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan pembiayaan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk serta



penguatan kelembagaan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, program yang dijalankan dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dirancang secara matang dan dijalankan secara konsisten dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Oleh karena itu, model yang dikembangkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ekosistem UMKM di berbagai daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Profil Industri Mikro dan Kecil 2020.
- Haratua, A., & Wijaya, C. (2020). Membangun Ekosistem Kewirausahaan untuk Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Saputra, A., Priadi, E., & Rustamaji (2024). Analysis of Slope Stability Due to Illegal Gold Mining. *Jurnal Teknik Sipil*.
- Situmorang, D., et al. (2024). Analysis of Accounting Knowledge Behavior and Accounting Recording on Revenue. *Al-Mal Journal*.
- Wahyudin, U. (2016). Model Penguatan Kemitraan dalam Pengembangan Usaha. Bandung.
- Wiratno, S. (2012). Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Yudhoyono, E. B. (2021). Pengembangan Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu. *Jurnal Inovasi*.

